

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan hak warga negara republik Indonesia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus (Nurfadhillah, 2021). Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kualitas pendidikan harus ditingkatkan (Harahap et al., 2025). Pendidikan dapat membantu anak mengembangkan potensinya dan membangun karakter yang tangguh (Shaifudin, 2021). Semua anak, termasuk perempuan, anak-anak kurang beruntung, dan anak-anak dari minoritas etnik, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang wajib dan berkualitas tinggi, pemerintah Indonesia saat ini adalah penekanan terkait pemerataan dan perluasan akses pada dunia pendidikan.

Terdapat banyak masalah dalam proses pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, beberapa anak membutuhkan perhatian khusus (Novira, 2017). Terdapat masalah perilaku sosial, kesulitan belajar, dan anak berbakat dan intelegensi yang luar biasa (Ginting et al., 2023). Hal penting yang perlu difokuskan adalah menyediakan suatu program pendidikan yang bisa mengakomodasi setiap kebutuhan anak.

Pendidikan inklusif saat ini telah menjadi isu yang sangat menarik dan menjadi fokus perkembangan dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang mengakomodasi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama di lingkungan pendidikan umum (Nadhiroh Umi, 2024). Pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan kemampuan kapasitas potensinya, di pendidikan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus dan anak normal dapat distimulasi, penyelenggaraan sekolah inklusif akan menjadi sangat relevan untuk peserta didik dari berbagai latar belakang untuk mengurangi diskriminasi, mewujudkan masyarakat yang terbuka dan inklusif, dan tercapainya tujuan pendidikan (Fitriani et al., 2022). Pendidikan inklusif juga dapat menjadi peluang bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah di sekolah reguler (Kurniawan, 2020).

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keragaman dan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga meningkatkan toleransi, empati, dan pengertian antar siswa (Amahoru & Ahyani, 2023). Pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di dalam suatu ruangan yang sama (Yunus, 2023). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menyediakan program pendidikan yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak (Widyawati, 2017). Pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama anak-anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Sekolah inklusi merupakan bagian dari strategi perwujudan layanan pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya agar mendapatkan pendidikan yang sama (Wijaya, 2023). Sekolah reguler dengan orientasi pendidikan inklusif merupakan cara paling tepat untuk mencegah deskriminasi dan menjadikan masyarakat inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah dimulai sejak lama bahkan tercantum dalam UUD 1945, dipertegas dan digaungkan kembali sejak adanya Deklarasi Bandung. Sejak adanya Deklarasi Bandung, pendidikan untuk anak - anak berkebutuhan khusus mulai berkembang.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003). Pendidikan inklusif merupakan sebuah paradigma yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam proses belajar mengajar (Hendayati et al., 2025). Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan tanpa diskriminasi sehingga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dan melaksanakan pendidikan yang menekankan pada keberagaman (Nugraheni, 2022).

Pendidikan Inklusif merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan

dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Uslan, 2020). Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman, di mana setiap siswa dianggap unik dengan potensi yang harus dikembangkan (Sumartik, 2024). Pendekatan pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri dan membangun pengetahuannya sendiri (Yudiana et al., 2021).

Dalam lingkungan pendidikan inklusif, perbedaan di antara siswa baik dari segi kemampuan, latar belakang budaya, bahasa, maupun kondisi fisik, dianggap sebagai kekayaan yang dapat memperkaya proses belajar mengajar (Salehuddin, 2023). Dengan demikian, pendidikan inklusif mendorong terciptanya atmosfer belajar yang harmonis dan saling menghormati, di mana setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Salah satu manfaat utama dari pendidikan inklusif adalah untuk meningkatkan toleransi di antara siswa (Dea Mustika et al., 2023). Pendidikan inklusi dapat memaksimalkan seluruh potensi serta keterampilan pelajarnya secara intens, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya (Harefa, 2023).

Melalui pembelajaran bersama dalam lingkungan yang inklusif, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan (Dwi Kurnia Zamroni et al., 2024). Melalui pembelajaran terkait cara menghargai perbedaan akan membantu mengurangi stereotip dan prasangka negatif yang mungkin ada di antara siswa terhadap mereka yang berbeda. Selain

itu, pendidikan inklusif juga dapat meningkatkan empati di antara siswa. Dengan memahami dan merasakan tantangan yang dihadapi oleh teman-teman mereka yang memiliki kebutuhan khusus, siswa dapat belajar untuk lebih peduli dan membantu satu sama lain. Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan inklusif sangat bermanfaat baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus mereka dapat belajar dan berinteraksi langsung dengan teman sebaya sehingga mereka dapat berkembang secara sosial dan emosi. Manfaat bagi peserta didik reguler yakni sebagai wadah untuk mengajarkan pada peserta didik agar dapat menghargai dan mengapresiasi orang lain, menghargai perbedaan dan menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat luas, lebih bersyukur, lebih peduli dan mengembangkan perasaan (Jannah, 2021).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan hak asasi manusia yang fundamental sebagai landasan untuk hidup bermasyarakat (Kalbu Patma Wati et al., 2024). Pendidikan inklusif membuka harapan dan peluang bagi individu yang termasuk dalam kelompok minoritas dan sering diabaikan untuk dapat mengakses pendidikan bersama dengan teman sebaya secara lebih inklusif, tanpa pemisahan. Perkembangan dari implementasi pendidikan inklusif di Indonesia terus berkembang terutama pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif (Hanaa, 2022).

Setiap anak memerlukan pendidikan yang membantu mereka berkembang dan berintegrasi dalam masyarakat secara normal. Sekolah inklusif dirancang untuk menyatukan anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK)

dalam lingkungan pembelajaran yang sama (Wardhani, 2020). Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan modifikasi kurikulum karena kebutuhan siswa ABK tentunya berbeda dengan kebutuhan siswa pada umumnya. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata sangat berpengaruh dan krusial dalam pengembangan sistem pendidikan. Hingga saat ini, anak-anak berkebutuhan khusus diberikan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan tingkat dan jenis kekhususannya melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, SLB masih menjadi penghalang bagi interaksi antara anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya, sehingga menghambat proses inklusif mereka secara maksimal. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan anak berkebutuhan khusus, begitupun sebaliknya, anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya (Nurfadhillah, 2021).

Proses pembelajarannya yang ramah dapat membuat anak termotivasi dan terdorong untuk terus mengembangkan potensi dan skill mereka sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki (Meka, 2023). Dalam lingkungan yang inklusif, siswa diajak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman mereka yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda (E. Ek. Saputra, 2024). Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih memahami perspektif dan pengalaman hidup orang lain, yang pada gilirannya dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mereka. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pendidikan inklusif (Juntak et al., 2023).

Banyak guru dan tenaga pendidik yang masih kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup tentang strategi pengajaran inklusif dan cara mengelola kebutuhan pendidikan khusus di dalam kelas (Sukomardojo, 2023). Di dunia pendidikan, guru juga mengalami beberapa permasalahan dan kendala-kendala yang dialami selama mengajar seperti dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki emosi yang stabil untuk dapat menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan siswa (Yudiana Edi, 2024). Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Semua pihak yang terlibat seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus berkomitmen untuk mencapai pendidikan inklusif. Pemerintah harus mendukung kebijakan dan regulasi yang mendorong inklusivitas di sekolah.

Sekolah diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan semua siswa termasuk guru harus dilatih untuk mengelola keragaman siswa dan mengajar di kelas yang heterogen serta orang tua dan masyarakat harus terlibat dalam mendukung dan mensosialisasikan pendidikan inklusif (Salma et al., 2025). Pendidikan inklusif bukan sekedar sebuah metode pendidikan, melainkan juga mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia (M Hasanah, 2024). Pendidikan inklusif membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan dengan memberikan akses pendidikan yang sama kepada semua anak. Dalam jangka panjang, pendidikan inklusif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi

yang lebih toleran, empatik, dan saling menghargai, yang siap menghadapi tantangan global dengan sikap yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan.

Di Indonesia, terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang diharapkan semua pihak lebih peduli dengan isu pendidikan karena pendidikan adalah hak semua orang untuk tanpa melihat atau memandang kelas, ras, suku, jenis kelamin, agama, dan fisik termasuk dengan anak berkebutuhan khusus. Mudjito (dalam Astawa, 2021) mengemukakan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan haknya sesuai kebutuhannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai 1,6 juta anak (Khairun Nisak, Dahliana, 2020). Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu dengan mendorong tumbuhnya sekolah inklusif di daerah-daerah.

Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, pada tahun 2020, sekitar 15-20% dari anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan inklusif atau layanan khusus di sekolah formal pada tahun 2021 (Frans Laka Lazar, 2020). Sebagian besar anak ABK, sekitar 80-85%, masih belum mendapatkan akses layanan khusus yang optimal, terutama di daerah-daerah terpencil dan minim fasilitas pendidikan inklusif (Liza, 2024). Data dari UNICEF juga menyoroti bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran dan inisiatif untuk menyediakan pendidikan inklusif, hanya sebagian kecil dari anak ABK yang mendapatkan dukungan khusus seperti modifikasi kurikulum, guru pendamping, dan fasilitas penunjang lain yang mereka butuhkan.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses pendidikan untuk semua anak, menggarisbawahi komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Di seluruh negeri, berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan untuk mendukung pendidikan inklusif. Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengembangkan berbagai program.

Program-program yang ada mencakup penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah bagi semua siswa, pelatihan khusus untuk guru, serta pengembangan kurikulum yang inklusif. Salah satu contohnya adalah program Sekolah Inklusif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia mampu menerima dan mendidik siswa dengan kebutuhan khusus secara efektif. Namun, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat sekolah dasar.

Tidak adanya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan inklusif adalah masalah tambahan (Pertwi et al., 2025). Anak-anak berkebutuhan khusus masih distigma oleh banyak orang tua dan masyarakat. Hal ini dapat menghalangi upaya sekolah untuk membuat lingkungan yang benar-benar inklusif yang menerima semua siswa. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus terus meningkatkan investasi dalam pendidikan inklusif, memberikan pelatihan guru dan sumber daya fisik. Sekolah-sekolah juga perlu didorong untuk mengadopsi pendekatan inklusif

dalam setiap aspek operasional mereka, mulai dari kebijakan sekolah hingga praktik pengajaran sehari-hari.

Menurut Susilowati (2022), kurikulum yang digunakan bagi Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler dapat dipastikan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut; anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individu (Susilowati et al., 2022). Pembelajaran yang diterapkan di kelas inklusi menerapkan prinsip pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (*student oriented*) (Mayyaza, 2025). Perlu adanya kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua anak. Dalam jangka panjang, keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Dengan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan, diharapkan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Hal ini tidak hanya membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, tetapi juga akan membentuk generasi yang lebih toleran, empatik, dan saling menghargai, siap menghadapi tantangan global dengan sikap inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Sekolah inklusif adalah sekolah reguler (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Janawati Gopi, 2020). Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan

belajar mengajar. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat jumlah sekolah reguler yang menjadi penyelenggara sekolah inklusi terus bertambah setiap tahun, hingga September 2023, jumlahnya mencapai 44.477 sekolah.

Dari banyaknya daerah penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia, Bali menjadi salah satu contohnya. Di Bali, sebanyak 94 sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas dan kejuruan telah menerapkan program pendidikan inklusif bagi siswa ABK. Anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk belajar bersama di sekolah reguler. Tantangan utama bagi guru adalah mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal di kelas, terutama di tingkat SD, di mana peralihan dari TK ke SD memerlukan proses adaptasi bagi anak-anak. Saat ini, tes seleksi untuk memasuki sekolah dasar sudah tidak diperbolehkan, sehingga guru tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah siswa memiliki kebutuhan khusus. Kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah menimbulkan tantangan tersendiri. Pendidikan inklusi memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka (Jayadi, 2023).

Kota Denpasar mencatat terdapat pemberian layanan bagi anak berkebutuhan khusus di beberapa pusat layanan pendidikan (Astawan, I Gede, Tirtayani & Ambara, 2021). Saat ini di Kota Denpasar, siswa ABK memiliki hak yang sama dengan siswa lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Salah satunya adalah SD Hainan School Denpasar, yang merupakan sekolah dasar reguler di mana hampir setiap kelas memiliki satu hingga dua siswa dengan kebutuhan inklusif, khususnya pada kelas rendah. Sekolah ini menunjukkan komitmen yang

kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, meskipun fasilitas dan sumber daya khusus untuk siswa berkebutuhan khusus mungkin masih terbatas.

Terbatasnya ketersediaan layanan pendidikan yang menampung siswa berkebutuhan khusus menjadi persoalan tersendiri yang harus segera diatasi dikarenakan hak siswa ABK juga sama dengan siswa normal lain untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Permasalahan lain yang terjadi jika anak dengan berkebutuhan khusus masih saja dipisahkan dengan anak normal nantinya akan sulit untuk membaaur dalam masyarakat (Agustina, 2021). Berdasarkan observasi ketika mengikuti Asistensi Mengajar dan juga wawancara dengan guru dan kepala sekolah tentang pendidikan inklusif diketahui bahwa terdapat 15 siswa yang membutuhkan pendampingan khusus. Dari jumlah tersebut, 2 siswa merupakan tuna wicara, 4 siswa menunjukkan perilaku hiperaktif, 7 siswa mengalami kesulitan belajar, dan 2 siswa lainnya adalah tuna rungu.

Berdasarkan hasil temuan awal yang telah dipaparkan perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan inklusif tercapai, semua siswa mendapatkan manfaat maksimal, serta mengidentifikasi sejauh mana kebijakan dan program inklusif yang diterapkan berjalan dengan baik dan area-area yang masih memerlukan perbaikan. Evaluasi merupakan komponen penting dalam setiap program, bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, kelangsungan program, tantangan yang dihadapi, serta umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Namun, pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus menjadi problem bagi sebagian guru (Arifin, 2023), yang

menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengajaran.

Evaluasi pendidikan inklusif telah berfokus pada proses pengumpulan data yang sistematis untuk menilai efektivitas penerapan program di berbagai sekolah. Proses evaluasi ini mencakup analisis mendalam dan pemahaman tentang efektivitas kebijakan pendidikan inklusif, terutama dalam konteks sekolah dasar. Penilaian ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Pelaksanaan program pendidikan Inklusif untuk siswa ABK di sekolah dasar, sebagai bagian dari sistem pendidikan, dapat dilakukan dengan pendekatan sistem CIPP (*context, input, process, product*).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa walaupun seluruh studi ini mengkaji pelaksanaan pendidikan inklusif, masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Fitriana dkk. (2022) menitikberatkan pada evaluasi aspek perencanaan pengembangan dan anggaran khusus di SD wilayah Koja, Jakarta Utara. Uslan dkk. (2020) menggunakan pendekatan analisis countenance dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Abdi Kasih Bangsa. Rina dkk. (2021) mengungkapkan adanya perbedaan sikap guru terhadap keberagaman siswa pada jenjang pendidikan yang berbeda, dengan tantangan penerapan yang cukup tinggi di tingkat SD dan SMP. Sementara itu, Sari dan Hartono (2022), serta Pratama dan Wijaya (2023) menekankan pentingnya strategi pengajaran serta adaptasi kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya melihat dari satu aspek seperti persepsi guru atau sarana prasarana, tetapi melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Pendekatan CIPP adalah model evaluasi program yang dirancang oleh Stufflebeam untuk menilai keberhasilan program secara menyeluruh melalui empat komponen utama. *Context* mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, dan latar belakang program untuk memastikan relevansi program dengan permasalahan yang ada. *Input* menganalisis sumber daya, strategi, dan rencana pelaksanaan yang mendukung tercapainya tujuan program. *Process* mengevaluasi pelaksanaan program untuk mengidentifikasi kendala, efektivitas, dan keefektifan prosedur. *Product* menilai pencapaian program, baik dari segi hasil langsung maupun dampak jangka panjang. Model ini memiliki beberapa keunggulan, seperti menyediakan evaluasi menyeluruh dari perencanaan hingga hasil, membantu pengambilan keputusan berbasis data untuk perbaikan program, fleksibel untuk berbagai jenis program, termasuk pendidikan inklusif, serta berfokus pada peningkatan kualitas, bukan sekadar pengukuran hasil.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam evaluasi pendidikan di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini sangat penting untuk memahami efektivitas program pendidikan inklusif yang diterapkan di SD Hainan School Denpasar. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan pihak sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, serta praktik terbaik yang dapat dijadikan model bagi sekolah lain yang ingin

menerapkan pendidikan inklusif. Melalui analisis data yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan program pendidikan inklusif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi SD Hainan School Denpasar, tetapi juga bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat yang lebih luas.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan analisis dalam latar belakang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi yaitu;

- 1) Kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah yang belum terimplementasi secara optimal, terutama dalam penyusunan pedoman operasional.
- 2) Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang kelas yang ramah ABK dan alat bantu belajar bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
- 3) Kurangnya pelatihan khusus bagi guru, yang menyebabkan ketidaksiapan dalam menangani siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif.
- 4) Proses pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan prinsip inklusivitas, misalnya kurangnya adaptasi kurikulum untuk siswa ABK.
- 5) Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pendidikan inklusif belum terstruktur, sehingga sulit mengidentifikasi keberhasilan atau tantangan utama.

- 6) Minimnya kerjasama dengan lembaga eksternal yang dapat membantu menyediakan sumber daya tambahan, seperti pendampingan psikologis atau pelatihan guru. (diskusikan lagi dengan pembimbing)

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini memiliki batasan permasalahan yang dimaksud untuk memberi gambaran yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah;

- 1) Penelitian ini hanya mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SD Hainan School Denpasar, meliputi analisis kebijakan, fasilitas, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran.
- 2) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan model CIPP yang melibatkan pengumpulan data pada aspek kebijakan (*context*), sumber daya (*input*), proses pelaksanaan pembelajaran (*process*), dan hasil pembelajaran (*product*).

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut,

- 1) Bagaimana kualitas *context* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar?
- 2) Bagaimana kualitas *input* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar ?
- 3) Bagaimana kualitas *process* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar ?

- 4) Bagaimana kualitas *product* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dipaparkan maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus disekolah SD Hainan School Denpasar

- 1) Untuk mengevaluasi kualitas konteks dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar, termasuk kebijakan sekolah yang mendukung implementasi pendidikan inklusif, serta sejauh mana kebijakan tersebut tercermin dalam visi, misi sekolah, dan dukungan dari pemangku kepentingan.
- 2) Untuk menilai kualitas input dalam pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar, dengan fokus pada evaluasi sumber daya yang ada seperti jumlah guru terlatih, fasilitas fisik, dan kurikulum yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi keterlibatan orang tua dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.
- 3) Untuk menganalisis kualitas proses dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar, dengan memperhatikan metode pengajaran, manajemen kelas, serta pelibatan siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dalam kegiatan belajar. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi interaksi antara siswa ABK dan siswa reguler dalam proses pembelajaran.

- 4) Untuk mengevaluasi kualitas produk dari program pendidikan inklusif di SD Hainan School Denpasar, dengan mengukur hasil yang dievaluasi baik secara akademik maupun non-akademik. Tujuan ini termasuk penilaian terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa ABK, prestasi akademik mereka, serta keberhasilan program pendidikan inklusif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan temuan penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis.

#### 1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori pendidikan inklusif di sekolah dasar, khususnya dengan adaptasi model evaluasi CIPP pada konteks Indonesia. Selain memperkaya literatur, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut dalam mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat yang berbeda atau dalam konteks daerah yang memiliki tantangan serupa.

#### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.

##### a. Untuk Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung siswa ABK di SD Hainan School Denpasar melalui peningkatan layanan pendidikan inklusif yang lebih personal dan adaptif, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan sosial-emosional.

b. Untuk Guru

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi guru dalam mengelola kelas inklusif, termasuk strategi adaptasi pembelajaran dan interaksi siswa. Pedoman ini akan membantu guru menciptakan suasana pembelajaran yang efektif bagi siswa ABK dan reguler.

c. Untuk Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pengembangan penelitian serupa, terutama dalam mengeksplorasi dimensi model evaluasi CIPP dalam konteks pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar.

